



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIRAH**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **464499**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.525.000.000

1. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 3950 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Bangunan Seluas 880 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 1594 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 1230 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 2504 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 1665 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 1123 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 1123 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
10. Bangunan Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
11. Tanah Seluas 1225 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
12. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL



SENDIRI Rp. 200.000.000

13. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

14. Bangunan Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

15. Bangunan Seluas 625 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 300.000.000

16. Tanah Seluas 1259 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 150.000.000

17. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 150.000.000

18. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 150.000.000

19. Tanah Seluas 2872 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

20. Tanah Seluas 1230 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 250.000.000

21. Tanah Seluas 804 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

22. Tanah Seluas 926 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 150.000.000

23. Bangunan Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 125.000.000

24. Tanah Seluas 927 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 200.000.000

25. Tanah Seluas 2560 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL

SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

525.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDAH MOTOR Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 11.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDAH MOTOR Tahun 2014, HASIL

SENDIRI Rp. 6.000.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDAH MOTOR Tahun 2015, HASIL



SENDIRI Rp. 8.000.000

6. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **8.500.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.350.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **7.063.850.000****III. HUTANG** Rp. **644.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **6.419.850.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.